

# RENCANA KERJIA (RENJA)

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

# 2026

laman setda :



f Pemkab Ponorogo  
@ponorogokab

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
SEKRETARIAT DAERAH 2025

Alamat : JL. Aloon – Aloon Utara No. 9, Ponorogo, Jawa Timur - 63413, Telepon 0352-481003, Faksimile 0352-481484

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-NYA penyusunan **Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026** dapat diselesaikan. Penyusunan Renja dilaksanakan dengan menghimpun semua program, kegiatan dan sub kegiatan dilingkup Sekretariat Daerah. Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupatti Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.

Penyusunan Rencana Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan yang harus disesuaikan dengan program yang lebih riil dan operasional sesuai dengan situasi yang berkembang di daerah saat ini. Oleh karena itu keberhasilan mewujudkan Rencana Kerja harus dilihat juga bagaimana asumsi-asumsi yang mendasarinya.

Meskipun terdapat berbagai penyesuaian-penyesuaian antara Rencana Kerja dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, secara prinsip komitmen terhadap visi dan misi organisasi harus tetap dipegang teguh oleh seluruh jajaran aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.

Rencana Kerja ini, disusun dengan harapan dapat menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2026 guna mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah dan menjadi pegangan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih belum sempurna, namun harapan kami agar Rencana Kerja ini bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO



AGUS PRAMONO

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah  
Format A (terlampir)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah  
Format B (terlampir)
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD  
Format C (terlampir)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
Format D (terlampir)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan  
Format E (terlampir)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

- Format A. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024
- Format B. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
- Format C. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
- Format D. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Ponorogo Tahun 2026
- Format E. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Ponorogo



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln Aloon-Aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, Jawa Timur 63413  
Telepon 0352-481003, Faksimile 0352-481484  
Laman setda.ponorogo.go.id, Pos-el setda@ponorogo.go.id

---

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 100.3.3.5/ARH/50/405.03.4/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, maka perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026, dengan uraian sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA digunakan sebagai Pedoman Sekretaris Daerah beserta jajaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,



AGUS PRAMONO

-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PONOROGO  
NOMOR : 100.3.3.5/ARH/50/405.03.4/2025  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026

---

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2026

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk merencanakan program kegiatan dan sub kegiatan untuk KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2026 dan merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2026 menyusun Rencana Kerja yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman

sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk Tahun 2026.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo melakukan penyusunan Renja SKPD Tahun 2026 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Ponorogo. Digunakannya substansi dan formula indikator Renstra atau RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai acuan Tahun 2029 didasarkan oleh alasan sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 145 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ;
2. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja Tahun 2026 berpedoman kepada Permendagri 90 Tahun 2019, Permenpan 20 Tahun 2007, dan indikator SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis masing-masing SKPD serta Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyempurnaan Ukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2024;
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja SKPD, Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah.

Setiap program kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja SKPD Tahun 2026 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 145 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah kebijakan dan sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan agar terdapat sinergitas dan kontinuitas dalam perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan di Kabupaten Ponorogo.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah  
Format A (terlampir)
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah  
Format B (terlampir)
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD  
Format C (terlampir)
- 2.5. Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
Format D (terlampir)

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan  
Format E (terlampir)

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV : PENUTUP**

Lampiran

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sebagai salah satu dasar penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026, dilakukan evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya. Dalam penyusunan Renja ini, dilakukan evaluasi Renja Sekretariat Daerah di tahun 2024.

Berhasil atau tidaknya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2024 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan selama satu tahun. Adapun pencapaian renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan merujuk pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 dan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) 2024 yang merupakan keseluruhan dari pelaksanaan renja bagian-bagian pada Sekretariat Daerah sebagai berikut :

Anggaran pendapatan Sekretariat Daerah Kab. Ponorogo pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 0,00. Anggaran belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 sebesar Rp. 61.755.680.150,00 yang terdiri Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 19.221.569.866,00 dan Belanja langsung sebesar Rp. 37.682.394.784,00 Sedangkan jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 59.582.869.317,00 ( kurang dari rencana sebesar 3,52% ) terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 18.848.430.065,00 dan belanja langsung sebesar Rp.35.887.433.752,00. Dengan demikian terjadi Defisit sebesar Rp. 59.582.869.317,00 dibandingkan dengan penerimaan pendapatan sebesar Rp. 0,00 dan pengeluaran belanja sebesar Rp. 59.582.869.317,00.

Dalam Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah menentukan beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan anggaran dan realisasi anggaran pada tiap-tiap Bagian sebagai berikut :

**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN  
BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				Prosentase Realisasi Anggaran (%)
		Operasi		Modal		
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	59.468.964.650,00	57.300.063.817,00	2.286.715.500,00	2.282.005.500,00	96,48
	SEKRETARIAT DAERAH	59.468.964.650,00	57.300.063.817,00	2.286.715.500,00	2.282.005.500,00	96,48
	SEKRETARIAT DAERAH	59.468.964.650,00	57.300.063.817,00	2.286.715.500,00	2.282.005.500,00	96,48
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.820.844.359,00	41.792.767.456,00	2.216.083.200,00	2.211.730.000,00	97,71
<i>4.01.01.2.01</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>462.572.359,00</i>	<i>461.882.813,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,85</i>
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	202.000.350,00	201.514.202,00	0,00	0,00	99,76
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	260.572.009,00	260.368.611,00	0,00	0,00	99,92
<i>4.01.01.2.02</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>18.043.309.100,00</i>	<i>17.731.046.148,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,27</i>
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.493.468.000,00	17.210.334.148,00	0,00	0,00	98,38
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	433.775.000,00	405.840.000,00	0,00	0,00	93,56
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.066.100,00	114.872.000,00	0,00	0,00	98,97
<i>4.01.01.2.05</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>612.077.000,00</i>	<i>589.273.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,27</i>
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	612.077.000,00	589.273.500,00	0,00	0,00	96,27
Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				Prosentase Realisasi Anggaran (%)
		Operasi		Modal		
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
<i>4.01.01.2.06</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>5.156.346.500,00</i>	<i>5.055.748.549,00</i>	<i>951.133.200,00</i>	<i>948.630.000,00</i>	<i>98,31</i>

4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.882.000,00	236.374.200,00	901.133.200,00	899.080.000,00	99,77
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	275.000.000,00	273.524.500,00	50.000.000,00	49.550.000,00	99,41
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	734.400.000,00	716.336.800,00	0,00	0,00	97,54
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	215.658.500,00	213.864.800,00	0,00	0,00	99,17
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	850.000.000,00	822.103.124,00	0,00	0,00	96,72
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.844.406.000,00	2.793.545.125,00	0,00	0,00	98,21
<i>4.01.01.2.08</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>4.155.554.675,00</i>	<i>3.963.888.405,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,39</i>
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	594.682.000,00	579.672.000,00	0,00	0,00	97,48
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.160.492.675,00	2.048.179.405,00	0,00	0,00	94,80
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.400.380.000,00	1.336.037.000,00	0,00	0,00	95,41
<i>4.01.01.2.09</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>4.906.633.425,00</i>	<i>4.722.573.104,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,25</i>
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.723.725.000,00	1.637.372.434,00	0,00	0,00	94,99
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	600.000.000,00	556.044.400,00	0,00	0,00	92,67
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.495.638.425,00	1.489.186.270,00	0,00	0,00	99,57
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.087.270.000,00	1.039.970.000,00	0,00	0,00	95,65
<i>4.01.01.2.11</i>	<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	<i>2.397.309.000,00</i>	<i>2.319.327.493,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,75</i>
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	797.309.000,00	732.844.552,00	0,00	0,00	91,91
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.600.000.000,00	1.586.482.941,00	0,00	0,00	99,16
4.01.01.2.12	<i>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	<i>5.563.925.400,00</i>	<i>5.533.150.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,45</i>
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	0,00	100,00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	168.000.000,00	161.986.000,00	0,00	0,00	96,42
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5.059.925.400,00	5.035.164.300,00	0,00	0,00	99,51
<i>4.01.01.2.13</i>	<i>Penataan Organisasi</i>	<i>716.931.000,00</i>	<i>611.508.844,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>85,60</i>
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	121.500.000,00	121.354.000,00	0	0,00	99,88

4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	164.385.000,00	62.266.144,00	0,00	0,00	37,88
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	431.046.000,00	427.888.700,00	0,00	0,00	99,27
4.01.01.2.14	<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>806.185.900,00</i>	<i>804.368.300,00</i>	<i>1.249.950.000,00</i>	<i>1.248.100.000,00</i>	<i>99,82</i>
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	526.824.000,00	526.749.000,00	0,00	0,00	99,99
Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				Prosentase Realisasi Anggaran (%)
		Operasi		Modal		
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	174.550.000,00	173.563.000,00	0,00	0,00	99,43
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	104.811.900,00	104.056.300,00	1.249.950.000,00	1.248.100.000,00	99,81
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.007.440.096,00	13.875.721.439,00	40.330.700,00	40.325.000,00	92,48
4.01.02.2.01	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>449.315.000,00</i>	<i>448.965.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,92</i>
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	21.837.988,00	21.837.988,00	0,00	0,00	100,00
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	125.492.800,00	125.406.000,00	0,00	0,00	99,93
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	301.984.212,00	301.712.712,00	0,00	0,00	99,91
4.01.02.2.02	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>14.021.446.796,00</i>	<i>12.908.496.314,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,06</i>
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.702.183.400,00	5.924.491.963,00	0,00	0,00	88,40
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	3.378.077.000,00	3.244.526.774,00	0,00	0,00	96,05
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.941.186.396,00	3.739.477.577,00	0,00	0,00	94,88
4.01.02.2.03	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	<i>527.228.300,00</i>	<i>508.814.425,00</i>	<i>40.330.700,00</i>	<i>40.325.000,00</i>	<i>99,63</i>
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	323.798.500,00	309.935.095,00	0	0,00	95,72
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	165.513.800,00	160.966.730,00	40.330.700,00	40.325.000,00	97,79
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	37.916.000,00	37.912.600,00	0,00	0,00	99,99
4.01.02.2.04	<i>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</i>	<i>9.450.000,00</i>	<i>9.445.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,95</i>
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	9.450.000,00	9.445.000,00	0,00	0,00	99,95
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.640.680.195,00	1.631.574.922,00	30.301.600,00	29.950.500,00	99,43
4.01.03.2.01	<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>651.276.000,00</i>	<i>645.237.523,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,07</i>
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	508.118.615,00	506.992.576,00	0,00	0,00	99,78
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	98.887.385,00	98.445.337,00	0,00	0,00	99,55

4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	44.270.000,00	39.799.610,00	0,00	0,00	89,90
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	139.921.438,00	139.622.200,00	0,00	0,00	99,79
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	43.868.760,00	43.652.200,00	0,00	0,00	99,51
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	69.303.300,00	69.290.000,00	0,00	0,00	99,98
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	26.749.378,00	26.680.000,00	0,00	0,00	99,74
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	549.904.357,00	548.265.339,00	16.500.000,00	16.150.500,00	99,65
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	447.300.207,00	446.224.070,00	0,00	0,00	99,76
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	65.621.600,00	65.422.937,00	16.500.000,00	16.150.500,00	99,33
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	36.982.550,00	36.618.332,00	0,00	0,00	99,02
Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				Prosentase Realisasi Anggaran (%)
		Operasi		Modal		
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	299.578.400,00	298.449.860,00	13.801.600,00	13.800.000,00	99,64
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	268.098.400,00	267.641.860,00	13.801.600,00	13.800.000,00	99,84
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	31.480.000,00	30.808.000,00	0	0,00	97,87
	<b>Jumlah</b>	<b>59.468.964.650,00</b>	<b>57.300.063.817,00</b>	<b>2.286.005.500,00</b>	<b>2.282.005.500,00</b>	<b>96,48</b>

## Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat sub kegiatan yang kurang maksimal dalam penyerapannya hal ini disebabkan oleh :

- 1) Minimnya tenaga teknis pengelola kegiatan.
- 2) Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan karena menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Propinsi.
- 3) Penyusunan anggaran yang kurang tepat guna.

Dari beberapa hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan upaya agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara optimal, yaitu :

- 1) Menyusun kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan.
- 2) Menambahkan tenaga teknis Pengelola Kegiatan.
- 3) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun.
- 4) Melakukan koordinasi dengan SKPD yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terarah, tepat waktu, efisien dan efektif.

Rincian hasil evaluasi renja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo s/d Tahun 2024 dapat dilihat pada Format A (terlampir).

**Format A**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra  
Sekretariat Daerah s/d Tahun 2024  
Kabupaten Ponorogo**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan keprotokolan,komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
		Prosentase dokumen Perencanaan dan Keuangan yang di susun tepat waktu	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
		Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
		Prosentase unsur pelayanan dengan nilai baik	97%	97%	97%	97%	100%	97%	97%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase dokumen Perencanaan dan Keuangan yang di susun tepat waktu</b>	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)		2 Dokumen						100%
		Jumlah dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPAP		4 Dokumen						100%
		Jumlah dokumen Proses Bisnis		1 Dokumen						100%
		Jumlah dokumen Cascading / Pohon Kinerja		1 Dokumen						100%
		Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja		1 Dokumen						100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	100%
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKj Setda		1 Dokumen						100%
		Jumlah dokumen laporan SPIP		1 Dokumen						100%
		Jumlah dokumen laporan evaluasi Renja		1 Dokumen						100%
		Jumlah dokumen laporan keuangan sekretariat daerah		1 Dokumen						100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Setda	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase penyerapan anggaran tepat waktu</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175 Orang/bulan	183 Orang/bulan	176 Orang/bulan	176 Orang/bulan	<b>100%</b>	175 Orang/bulan	175 Orang/bulan	100%
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kegiatan pembinaan Anggota Korps Musik Bahana Praja Pemkab. Ponorogo		12 kegiatan						100%
		Jumlah kegiatan pembinaan Anggota Paduan Suara Gita Swara Praja Pemkab. Ponorogo		12 kegiatan						100%
		Jumlah kegiatan upacara yang didukung dengan iringan musik Korps Musik Bahana Praja		15 kegiatan						100%
		Jumlah kegiatan upacara yang didukung dengan iringan Paduan Suara Gita Swara Praja		12 kegiatan						100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah kelompok pendukung kegiatan upacara pemerintah daerah yang difasilitasi		2 kelompok						100%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	100%	20 Dokumen	20 Dokumen	100%
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang terverifikasi		5700 Dokumen						100%
		Jumlah dokumen SPM yang dibuat		1300 Dokumen						100%
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4300 Dokumen		2100 Dokumen	2100 Dokumen	100%	4300 Dokumen	4300 Dokumen	100%
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pimpinan dan Pegawai penerima fasilitas pakaian dinas dan kelengkapannya		19 Orang						100%
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket		10 Paket	10 Paket	100%	8 Paket	8 Paket	100%
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		<b>perlengkapan dan rumah tangga</b>								
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bangunan Gedung/Kantor Yang Terfasilitasi Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7 Gedung/Kantor						100%
		Jumlah Bangunan Rumah Jabatan Yang Terfasilitasi Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3 Rumah Jabatan						100%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	100%			100%
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pegawai di Lingkup Setda yang terfasilitasi makan minumannya		259 Orang			100%			100%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bagian di Lingkup Setda yang Terfasilitasi Kebutuhan Cetak dan Penggandaannya								
		Jumlah Bagian di Lingkup Setda yang Terfasilitasi Kebutuhan ATKnya		10 Bagian						100%
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah acara yang terfasilitasi perengkapannya		60 acara					60 acara	100%
		Jumlah jenis acara dalam kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar		7 jenis					7 jenis	100%
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang terfasilitasi dalam kunjungan kerja dalam daerah		45 ASN						100%
		Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kada, Wakada dan Pegawai yang terfasilitasi		450 kegiatan						100%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan		450 Laporan	450 Laporan	100%	600 Laporan	600 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebeleur yang dilaksanakan		1 Paket						100%
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 Unit	3 Unit	100%			100%
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Naskah Dinas yang dikelola		8.150 dokumen						100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	100%	40 Laporan	40 Laporan	100%
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		6 Jenis						100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah MOU jasa cleaning service		1 MOU						100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		jumlah operasional pengelolaan sumber PAD		110 operasional						100%
		Jumlah Personil Panitia dan Pendukung Kegiatan HUT yang terfasilitasi		260 Orang						100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Kelompok Asset Tetap dalam kondisi baik</b>	<b>4 Kelompok Asset Tetap</b>	<b>4 Kelompok Asset Tetap</b>	<b>4 Kelompok Asset Tetap</b>	<b>4 Kelompok Asset Tetap</b>	<b>100%</b>	<b>4 Kelompok Asset Tetap</b>	<b>4 Kelompok Asset Tetap</b>	<b>100%</b>
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		43 unit						100%
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit		42 Unit	42 Unit	100%	42 Unit	42 Unit	100%
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebeleur yang terpelihara		6 jenis						100%
		Jumlah Mebel yang Dipelihara			6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang terpelihara		16 jenis						100%
		Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		20 jenis						100%
		Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang terpelihara		20 jenis						100%
		Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara		20 jenis						100%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	20 Unit	100%
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung yang terpelihara		7 Bangunan Gedung						100%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		7 Unit	7 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rumah jabatan/dinas yang terpelihara		3 Rumah Dinas/Jabatan						100%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		4 Unit	4 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Prosentase penyerapan anggaran tepat waktu</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	100%	4 Orang	4 Orang	100%
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Intensitas Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang terpenuhi		12 bulan						100%
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Intensitas Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi		12 bulan						100%
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah pegawai dan tamu yang terfasilitasi Kebutuhan Rumah Tangganya		50.000 Orang						100%
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	150 paket		150 paket	150 paket	100%	150 paket	150 paket	100%
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi penyusunan Laporan Kinerja (LKj)</b>	<b>47 Perangkat Daerah</b>	<b>47 Perangkat Daerah</b>	<b>47 Perangkat Daerah</b>	<b>47 Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>47 Perangkat Daerah</b>	<b>47 Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen analisis jabatan perangkat daerah								
		Jumlah dokumen analisis beban kerja perangkat daerah								
		Jumlah dokumen Perbup penataan kelembagaan perangkat daerah								
		Jumlah dokumen profil perangkat daerah								
		Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan								
		Jumlah regulasi tentang penataan kelembagaan Perangkat Daerah		6 Dokumen						100%
		Jumlah regulasi tentang penetapan kelas jabatan		4 Dokumen						100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah telaahan staf tentang rekomendasi kebijakan		5 Dokumen						100%
		Jumlah telaahan staf tentang rumusan masalah kebijakan		5 Dokumen						100%
		Keterlibatan sebagai pengajar pada diklat fungsional/teknis dibidang kebijakan		24 Jam						100%
		Sertifikasi keikutsertaan sebagai peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi		10 Dokumen						100%
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah ID Card PNS yang di cetak		12000 ID Card						100%
		Jumlah dokumen IKM		1 Dokumen						100%
		Jumlah dokumen SPP		43 Dokumen						100%
		Jumlah dokumen SOP		47 Dokumen						100%
		Jumlah Unit Pelayanan yang difasilitasi penyusunan inovasi pelayanan publik		5 Unit Pelayanan						100%
		Jumlah dokumen kajian dan analisis kebijakan		5 Dokumen						100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi i Target Renstra (%)
		Jumlah PNS yang difasilitasi foto ID card		1000 Orang						100%
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Jumlah Perangkat Daerah/Unit Pelayanan yang mengikuti lomba budaya kerja tingkat Provinsi Jawa Timur		3 Perangkat daerah/ Unit pelayanan						100%
		Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan RB		1 Dokumen						100%
		Jumlah peserta Bimbingan Teknis		36 Orang						100%
		Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi budaya kerja		1 Dokumen						100%
		Jumlah dokumen pendukung LKE PMPRB instansi		1 Dokumen						100%
		Jumlah dokumen rumusan kebijakan		3 Dokumen						100%
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan keprotokolan,komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan Pimpinan Daerah yang difasilitasi pelayanan keprotokolan								
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	100%	360 Laporan	360 Laporan	100%
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah hasil koordinasi yang dijadikan bahan pelaksanaan kegiatan								
		Jumlah dokumen informasi perkembangan pemerintahan								
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	100%	360 Laporan	360 Laporan	100%
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah dokumen peliputan kegiatan pimpinan daerah								
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	100%	360 Laporan	360 Laporan	100%
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		penyusunan LPPD secara tepat waktu								
		Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	92%	92%	92%	92%	100%	92%	92%	100%
		Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	80%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	100%
<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun LPPD dan SPM dengan benar dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen pendukung proses pemekaran kecamatan, penggabungan kecamatan dan penyesuaian kecamatan								
		Jumlah sinergitas kinerja kecamatan dan pelayanan terpadu kecamatan								
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya		1 Dokumen						100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Dokumen						100%
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		1 Dokumen						100%
		Jumlah kecamatan yang mengikuti program sinergitas kecamatan		1 Kecamatan						100%
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Wilayah	Jumlah dokumen rupa bumi		2 Dokumen						100%
		Jumlah dokumen batas wilayah		21 Dokumen						100%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Wilayah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen LPPD		1 Dokumen						100%
		Jumlah dokumen LKPJ		1 Dokumen						100%
		Jumlah dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)		1 Dokumen						100%
		Jumlah fasilitasi izin cuti bupati/wakil bupati dan jumlah fasilitasi proses administrasi PAW pimpinan dan anggota DPRD		1 Dokumen						100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen terlaksananya HUT Prov Jatim		1 Dokumen						100%
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	100%	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Prosentase koordinasi di bidang kesra dan masyarakatan yang ditindaklanjuti</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah peserta yang mengikuti MTQ		180 peserta						100%
		Jumlah peserta bintek peningkatan kapasitas dan kapabilitas mubaliq		500 peserta						100%
		Jumlah Masjid penerima bantuan operasional		13 masjid						100%
		Prosentase usulan hewan kurban yang dipenuhi		70%						100%
		Jumlah Rangkaian kegiatan peringatan hari raya idul fitri		9 penyelenggaraan						100%
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah penerima bantuan sosial masyarakat		80 orang						100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Prosentase proposal hibah yang diverifikasi dan dimonitor tepat waktu		80%						100%
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan hari besar nasional dan keagamaan		9 penyelenggaraan						100%
		Jumlah Jamaah haji yang terfasilitasi pemberangkatan dan pemulangan		550 jamaah						100%
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas								
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang diselesaikan tepat waktu		2000 Dokumen						100%
		Jumlah laporan hasil koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi		60 Laporan						100%
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1420 Dokumen		1310 Dokumen	1310 Dokumen	100%	1420 Dokumen	1420 Dokumen	100%
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Prosentase permasalahan hukum yang diselesaikan		100%						100%
		Jumlah dokumen laporan RANHAM		4 Dokumen						100%
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus		3 Kasus	3 Kasus	100%	3 Kasus	3 Kasus	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang dipublikasikan		2000 Dokumen						100%
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum		210 Peserta						100%
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1315 Dokumen		1251 Dokumen	1251 Dokumen	100%	1315 Dokumen	1315 Dokumen	100%
<b>4.01.02.2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Prosentase kerjasama daerah yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah dokumen kerjasama daerah dalam negeri		1 Dokumen						100%
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20 Dokumen	20 Dokumen	100%
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
		<b>Prosentase Rumusan Kebijakan</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Perekonomian yang ditindaklanjuti								
		Prosentase realisasi belanja pengadaan	89%	89%	89%	89%	100%	89%	89%	100%
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Prosentase permasalahan di bidang kebijakan perekonomian yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.01.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dilakukan monitoring dan evaluasi		3 BUMD						100%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.02.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang dikoordinasikan di bidang DBHCHT								100%
		Jumlah operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal/rokokilegal yang dilaksanakan		10 Lokasi						100%
		Jumlah operasi pasar pengendalian inflasi daerah		7 Pasar						100%
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.02.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah pasar/gudang yang di monitoring dan koordinasi Tim TPID								
		Jumlah SKPD yang dikoordinasikan di bidang perekonomian mikro kecil		10 SKPD						100%
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Prosentase Perangkat Daerah yang penyerapan dana APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan perubahan		2 dokumen						100%
		Jumlah Dokumen Evaluasi Penyerapan dan Pengawasan Anggaran (TEPRA)		12 dokumen						100%
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Progres Pembangunan Daerah (PPD)		12 dokumen						100%
		Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Aplikasi SMEP		50 perangkat daerah						100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pembangunan Daerah (HPD)		12 dokumen						100%
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Prosentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>Prosentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilelang melalui SPSE selesai tepat waktu</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
		<b>Prosentase efisiensi anggaran setelah dilakukan proses tender</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan tepat waktu		103 paket						100%
		Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa		103 dokumen						100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Laporan Fisik proses PBJ		4 dokumen						100%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Nilai kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan PBJ secara elektronik (e-procurement)		103 skm						100%
		Jumlah permintaan/perubahan user ID penyedia dan pengelola		150 dok						100%
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM barang/Jasa yang mempunyai sertifikat keahlian		15 orang						100%
		Prosentase sengketa pengadaan barang/Jasa yang diselesaikan		100%						100%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	100 Orang	100%
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Prosentase permasalahan/isu strategis di bidang sumber daya alam yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 ( n-2 )			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.02.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
4.01.02.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 dokumen	4 Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100

Dengan adanya Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 pada masing-masing Bagian sebagaimana tersebut di atas, maka untuk penyelesaian beberapa permasalahan yang masih dihadapi Sekretariat Daerah akan dilakukan beberapa upaya melalui Renja Sekretariat Daerah tahun 2026 antara lain :

1. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Pengelola Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada masing-masing Bagian selaku penanggungjawab Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
2. Peningkatan Kinerja melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana yang memadai.
3. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Perencanaan, Kebijakan dan Penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada masing-masing Bagian.
4. Peningkatan Sistem Informasi, Monitoring, Pengendalian, Pelaporan, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Informatif, Partisipatif, Transparan, Efektif dan Efisien serta Akuntabel.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah**

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo dengan realisasinya dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan hasil pengukurannya, Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo dapat dijelaskan pada Format B (terlampir) di bawah ini :

## Format B

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>4.01.01.2.01</b>	<b>Prosentase dokumen Perencanaan dan Keuangan yang di susun tepat waktu</b>			<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>Bagian Perencanaan dan Keuangan</b>
4.01.01.2.01.0001	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	9 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	
4.01.01.2.01.0006	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Prosentase penyerapan anggaran tepat waktu</b>			<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>Bagian Perencanaan dan Keuangan</b>
4.01.01.2.02.0001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN -			176 Orang/bulan	175 Orang/bulan	175 Orang/bulan	175 Orang/bulan	176 Orang/bulan	175 Orang/bulan	175 Orang/bulan	175 Orang/bulan	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 ( n )	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
4.01.01.2.02.0002	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			30 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	30 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	
4.01.01.2.02.0003	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2100 Dokumen	4300 Dokumen	4300 Dokumen	4300 Dokumen	2100 Dokumen	4300 Dokumen	4300 Dokumen	4300 Dokumen	
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Prosentase administrasi kepegawaian tepat waktu</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian Umum</b>
4.01.01.2.05.0002	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			10 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	10 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga</b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>Bagian Umum</b>
4.01.01.2.06.0001	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket				2 Paket				
4.01.01.2.06.0002	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	3 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 ( n )	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
4.01.01.2.06.0003	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			2 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	2 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	
4.01.01.2.06.0004	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	
4.01.01.2.06.0005	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	
4.01.01.2.06.0008	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
4.01.01.2.06.0009	Jumlah Pegawai yang terfasilitasi dalam kunjungan kerja dalam daerah			45 ASN	45 ASN			45 ASN	45 ASN			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			450 Laporan	600 Laporan	600 Laporan	600 Laporan	450 Laporan	600 Laporan	600 Laporan	600 Laporan	
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga</b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>Bagian Umum</b>
4.01.01.2.07.0005	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 Unit				3 Unit				

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga</b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>Bagian Umum</b>
4.01.01.2.08.0001	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			20 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	20 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	
4.01.01.2.08.0002	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	
4.01.01.2.08.0004	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Jumlah Kelompok Asset Tetap dalam kondisi baik</b>			<b>4 Kelompok Asset Tetap</b>	<b>4 Kelompok Asset Tetap</b>	<b>4 Kelompok Asset Tetap</b>	<b>4 Kelompok Asset Tetap</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4 Kelompok Asset Tetap</b>	<b>4 Kelompok Asset Tetap</b>	<b>Bagian Umum</b>
4.01.01.2.09.0001	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			42 Unit	42 Unit	42 Unit	42 Unit	42 Unit	42 Unit	42 Unit	42 Unit	
4.01.01.2.09.0005	Jumlah Mebel yang Dipelihara			6 Unit				6 Unit				

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
4.01.01.2.09.0006	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	
4.01.01.2.09.0009	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			7 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	7 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	
4.01.01.2.09.0010	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	4 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Prosentase penyerapan anggaran tepat waktu</b>			<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>Bagian Umum</b>
4.01.01.2.11.0001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	
4.01.01.2.11.0003	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 ( n )	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga</b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>Bagian Umum</b>
4.01.01.2.12.0001	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	
4.01.01.2.12.0002	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	
4.01.01.2.12.0003	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			150 paket	150 paket	150 paket	150 paket	150 paket	150 paket	150 paket	150 paket	
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi penyusunan Laporan Kinerja (LKj)</b>			<b>47 Perangkat Daerah</b>	<b>47 Perangkat Daerah</b>	<b>47 Perangkat Daerah</b>	<b>47 Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>47 Perangkat Daerah</b>	<b>47 Perangkat Daerah</b>	<b>Bagian Organisasi</b>
4.01.01.2.13.0001	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
4.01.01.2.13.0002	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
4.01.01.2.13.0003	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan keprotokolanan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan</b>			<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>
4.01.01.2.14.0001	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolanan			360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	
4.01.01.2.14.0002	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	
4.01.01.2.14.0003	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	
<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun LPPD dan SPM dengan benar dan tepat waktu</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama</b>
4.01.02.2.01.0001	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 ( n )	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
4.01.02.2.01.0002	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
4.01.02.2.01.0003	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Prosentase koordinasi di bidang kesra dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti</b>			<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>
4.01.02.2.02.0001	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
4.01.02.2.02.0002	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 ( n )	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
4.01.02.2.02.0003	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</b>			<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>Bagian Hukum</b>
4.01.02.2.03.0001	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			1310 Dokumen	1420 Dokumen	1420 Dokumen	1420 Dokumen	1310 Dokumen	1420 Dokumen	1420 Dokumen	1420 Dokumen	
4.01.02.2.03.0002	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	
4.01.02.2.03.0003	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			1251 Dokumen	1315 Dokumen	1315 Dokumen	1315 Dokumen	1251 Dokumen	1315 Dokumen	1315 Dokumen	1315 Dokumen	
<b>4.01.02.2.04</b>	<b>Prosentase kerjasama daerah yang terfasilitasi</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama</b>

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 ( n )	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
4.01.02.2.04.0001	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Prosentase permasalahan di bidang kebijakan perekonomian yang terselesaikan</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>
4.01.02.2.01.0001	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
4.01.02.2.01.0002	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
4.01.02.2.01.0003	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Prosentase Perangkat Daerah yang penyerapan dana APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu</b>			<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>
4.01.03.2.02.0001	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 ( n )	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
4.01.03.2.02.0002	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
4.01.03.2.02.0003	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Prosentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>
4.01.03.2.03.0001	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
4.01.03.2.03.0002	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
4.01.03.2.03.0003	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Prosentase permasalahan/isu strategis di bidang sumber daya alam yang terselesaikan</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 ( n )	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
4.01.02.2.04.0001	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
4.01.02.2.04.0002	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			4 Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam mencapai tujuan organisasi diperlukan suatu kebijakan sebagai arah organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepan. Adapun arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ;
2. Fasilitasi penyusunan progres report kegiatan (bulanan/triwulan/semester dan tahunan) baik administratif maupun e-report ;
3. Pengendalian Kebijakan KDH ;
4. Seluruh SKPD di Kabupaten Ponorogo wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK dan LKj) ;
5. Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/ asistensi/ pendampingan untuk meningkatkan pelayanan publik .

Adapaun Strategi berupa langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah;
2. Mendorong Perangkat Daerah untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kinerja dan data pendukung dengan baik, akurat dan valid ;
3. Meningkatkan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE ;

4. Meningkatkan, mengevaluasi dan mengawasi realisasi penyerapan anggaran internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH yang transparan dan akuntabel ;
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan melengkapi dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK dan LKj);
6. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan SPM dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan public.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rancangan Awal RKPD yang telah disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Ponorogo telah mengakomodir semua program kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo. Keselarasan program kegiatan dan sub kegiatan baik dalam jumlah maupun indikator yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan Rencana Kerja SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo disajikan dalam Format C (terlampir).

## Format C

### Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ( Rp. )	Program, Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp. )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				60.667.424.205	SEKRETARIAT DAERAH				61.212.425.005,19	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga	90%	17.831.992.170	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase cakupan pelayanan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian yang sesuai SOP	90%	39.550.286.935,19	Asisten 3
			Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	90%	535.500.000			Indeks Kepuasan Masyarakat	90,28	3.608.913.925,00	

			Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan	90%	576.523.200			Indeks Pelayanan Publik	4,34	535.500.000,00	
			Prosentase dokumen Perencanaan dan Keuangan yang di susun tepat waktu	95%	24.205.685.490,19			Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	71		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo	Prosentase dokumen Perencanaan dan Keuangan yang di susun tepat waktu	95%	727.597.241	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo	Prosentase dokumen Perencanaan dan Keuangan yang di susun tepat waktu	95%	727.597.241	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	365.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	365.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	362.597.241,19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	362.597.241,19	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo	Prosentase penyerapan anggaran tepat waktu	95%	20.169.985.874,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo	Prosentase penyerapan anggaran tepat waktu	95%	20.169.985.874,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan /

											<b>Bagian Umum</b>
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175 Orang/bulan	19.410.475.874,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175 Orang/bulan	19.410.475.874,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	759.510.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	759.510.000,00	Bagian Umum
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>419.000.000,00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>419.000.000,00</b>	<b>Bagian Umum</b>
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	419.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	419.000.000,00	Bagian Umum
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga</b>	<b>90%</b>	<b>4.499.743.725,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga</b>	<b>90%</b>	<b>4.499.743.725,00</b>	<b>Bagian Umum</b>
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	530.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	530.000.000,00	Bagian Umum
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	602.463.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	602.463.000,00	Bagian Umum

4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.094.400.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.094.400.000,00	Bagian Umum
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	192.744.500,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	192.744.500,00	Bagian Umum
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	2.080.136.225,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	2.080.136.225,00	Bagian Umum
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90</b>	<b>545.000.000,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90</b>	<b>545.000.000,00</b>	<b>Bagian Umum</b>
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	545.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	545.000.000,00	Bagian Umum
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga</b>	<b>90</b>	<b>4.444.592.675,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga</b>	<b>90</b>	<b>4.444.592.675,00</b>	<b>Bagian Umum</b>
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.140.492.675,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.140.492.675,00	Bagian Umum

4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.304.100.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.304.100.000,00	Bagian Umum
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Jumlah Kelompok Asset Tetap dalam kondisi baik</b>	<b>4 Kelompok</b>	<b>4.153.655.770,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Jumlah Kelompok Asset Tetap dalam kondisi baik</b>	<b>4 Kelompok</b>	<b>4.153.655.770,00</b>	<b>Bagian Umum</b>
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	1.409.008.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	1.409.008.000,00	Bagian Umum
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.744.647.770,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.744.647.770,00	Bagian Umum
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.000.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.000.000.000,00	Bagian Umum
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase penyerapan anggaran tepat waktu</b>	<b>95%</b>	<b>2.889.102.375,00</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase penyerapan anggaran tepat waktu</b>	<b>95%</b>	<b>2.889.102.375,00</b>	<b>Bagian Perencanaan dan Keuangan / Bagian Umum</b>

4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.889.102.375,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.889.102.375,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	1.000.000.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	1.000.000.000,00	Bagian Umum
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga</b>	<b>90 %</b>	<b>4.734.000.000,00</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga</b>	<b>90 %</b>	<b>4.734.000.000,00</b>	<b>Bagian Umum</b>
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	336.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	336.000.000,00	Bagian Umum
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	168.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	168.000.000,00	Bagian Umum
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	150 Paket	4.230.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	150 Paket	4.230.000.000,00	Bagian Umum

<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi menyusun Laporan Kinerja (LKj)</b>	<b>47 Perangkat daerah</b>	<b>535.500.000,00</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi menyusun Laporan Kinerja (LKj)</b>	<b>47 Perangkat daerah</b>	<b>535.500.000,00</b>	<b>Bagian Organisasi</b>
4.01.04.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	317.946.000,00	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	317.946.000,00	Bagian Organisasi
4.01.04.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi birokrasi	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	217.554.000,00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi birokrasi	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	217.554.000,00	Bagian Organisasi
<b>4.01.04.2.14</b>	<b>Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan</b>	<b>85%</b>	<b>576.523.200,00</b>	<b>Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan</b>	<b>85%</b>	<b>576.523.200,00</b>	<b>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>
4.01.04.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	360 Laporan	167.973.200,00	Fasilitasi Keprotokolan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	360 Laporan	167.973.200,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.01.04.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	360 laporan	58.550.000,00	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	360 laporan	58.550.000,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.01.02.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	360 laporan	350.000.000,00	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	360 laporan	350.000.000,00	Bagian Protokol dan Komunikasi

											Pimpina n
4.01.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Presentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>474.385.000,00</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Nilai LPPD</b>	<b>3,1695</b>	<b>474.385.800,00</b>	
			<b>Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi</b>	<b>92%</b>	<b>14.569.872.200,00</b>			<b>Efektifitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat</b>	<b>92%</b>	<b>14.569.872.200,00</b>	<b>Asisten 1</b>
			<b>Presentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</b>	<b>80%</b>	<b>466.384.000,00</b>			<b>Indeks Reformasi Hukum</b>	<b>98,5</b>	<b>466.384.000,00</b>	
4.01.02.2.01	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Presentase Perangkat Daerah yang menyusun LPPD dan SPM dengan benar dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>437.147.000,00</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Presentase Perangkat Daerah yang menyusun LPPD dan SPM dengan benar dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>437.147.800,00</b>	<b>Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama</b>
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	180.075.000,00	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	180.075.000,00	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	10.942.000,00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	10.942.800,00	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15 Dokumen	246.130.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15 Dokumen	246.130.000,00	

<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase koordinasi dibidang kesra dan masyarakatan yang ditindaklanjuti</b>	<b>92%</b>	<b>14.569.872.200,00</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase koordinasi dibidang kesra dan masyarakatan yang ditindaklanjuti</b>	<b>92%</b>	<b>14.569.872.200,00</b>	<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	5.645.990.200,00	Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	5.645.990.200,00	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	6.008.882.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	6.008.882.000,00	

4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen	2.915.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen	2.915.000.000,00	
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</b>	<b>100%</b>	<b>466.384.000,00</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</b>	<b>100%</b>	<b>466.384.000,00</b>	<b>Bagian Hukum</b>
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1420 Dokumen	306.508.500,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1420 Dokumen	306.508.500,00	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	121.959.500,00	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	121.959.500,00	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1315 Dokumen	37.916.000,00	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1315 Dokumen	37.916.000,00	
<b>4.01.02.2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase kerjasama daerah yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>37.238.000,00</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase kerjasama daerah yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>37.238.000,00</b>	<b>Bagian Tata Pemerintahan dan</b>

												<b>Kerjasama</b>
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	37.238.000,00	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	37.238.000,00		
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE</b>	<b>90%</b>	<b>541.404.357,00</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan</b>	<b>90%</b>	<b>1.325.756.000,00</b>		
			Prosentase Rumusan Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	90%	1.325.756.000,00			Tingkat kematangan UKPBJ	90%	541.404.357,00		Asisten 2
			Prosentase realisasi belanja pengadaan	89%	139.921.788,00			Efektifitas kebijakan administrasi pembangunan	91%	139.921.788,00		
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase permasalahan di bidang kebijakan perekonomian yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>722.776.000,00</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase permasalahan di bidang kebijakan perekonomian yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>722.776.000,00</b>		Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA
4.01.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	643.118.615,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	643.118.615,00		

4.01.02.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	52.387.385,00	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	52.387.385,00	
4.01.02.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	27.270.000,00	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	27.270.000,00	
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase Perangkat Daerah yang penyerapan dana APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu</b>	<b>90%</b>	<b>139.921.788,00</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase Perangkat Daerah yang penyerapan dana APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu</b>	<b>90%</b>	<b>139.921.788,00</b>	<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	14 Dokumen	43.873.610,00	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	14 Dokumen	43.873.610,00	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	69.303.300,00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	69.303.300,00	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	26.744.878,00	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	26.744.878,00	
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa</b>	<b>100%</b>	<b>541.404.357,00</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa</b>	<b>100%</b>	<b>541.404.357,00</b>	<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	465.193.507,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	465.193.507,00	

4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	37.728.300,00	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	37.728.300,00	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	38.482.550,00	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	38.482.550,00	
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase permasalahan/isu strategis di bidang sumber daya alam yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>602.980.000,00</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>Prosentase permasalahan/isu strategis di bidang sumber daya alam yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>602.980.000,00</b>	<b>Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA</b>
4.01.02.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	571.500.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	571.500.000,00	
4.01.02.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	31.480.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kabupaten Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	31.480.000,00	

Hasil Review Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo sudah melakukan efisiensi penganggaran program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan namun tetap menghasilkan kinerja akhir yang optimal. Hal ini dilakukan setelah melakukan analisa terhadap data kinerja tahun 2024.

Proses penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 didasarkan kepada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan terwujud sinergitas dan keselarasan antara dokumen perencanaan dengan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam konteks penyusunan rencana kerja SKPD, Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan, memicu keikutsertaan, pelayanan prima dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, SKPD dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Usulan program dan kegiatan masyarakat tersaji dalam Format D (terlampir).

**Format D**

**Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Kabupaten Ponorogo Tahun 2026**

<b>Kode</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
1	2	3	4	5	6
	Nihil				

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat telah menyerahkan urusan pemerintahan tertentu kepada daerah sehingga menjadi otonomi daerah. Dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya. Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan APBD setiap daerah tidak sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya ada keterbatasan dan kendala. Untuk mendukung tujuan tersebut maka berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 137 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dan dalam melaksanakan tugas , Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Visi Kabupaten Ponorogo adalah Mewujudkan Ponorogo Hebat (Harmonis , Elok , Bergas , Amanah , dan ber-Takwa)

Misi Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial;
2. Transformasi Ekonomi Dalam Rangka Penguatan UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes Melalui Riset Inovasi, Implementasi Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Wilayah Serta Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi;
4. Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi;
5. Pemenuhan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur dengan pendekatan konektivitas untuk mendukung Kawasan Strategis dan Pemerataan Pembangunan;

Misi yang sesuai dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo adalah Misi 4, yaitu Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ponorogo pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo 2025-2029 adalah sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KETERANGAN	
VISI : Mewujudkan Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan ber-Taqwa)						
MISI 4 : Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi						
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan bertanggung jawab	1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	1. Terwujudnya kesetaraan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat	1. Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu (%)	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	
		2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi (%)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		3. Prosentase capaian IRH atas penyusunan dan evaluasi produk hukum daerah (%)	Bagian Hukum	
		4. Indeks Reformasi Hukum (IRH)	2. Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah	1. Prosentase koordinasi TPID dalam pengendalian inflasi (%)	Bagian Perekonomian dan SDA	
		5. LPPD		2. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		6. Return On Asset (ROA) BUMD		3. Prosentase realisasi belanja barang jasa dan modal (%)		Bagian Administrasi Pembangunan
		7. Indeks Pelayanan Publik (IPP)		1. Prosentase perangkat daerah yang menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) tepat waktu (%)		Bagian Organisasi
		8. Indeks Zakat Nasional (IZN)	3. Tata kelola pemerintah yang bersih dan transparan, serta pelayanan public yang unggul berbasis elektronik	2. Prosentase unit pelayanan publik yang menyusun ,menyampaikan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (%)	Bagian Organisasi	

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Adapun Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 yang sesuai dengan sasaran yang ingin diwujudkan Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ponorogo pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo 2025-2029 tersaji dalam Format E (terlampir) sebagai berikut :

**Format E**

**Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027**

**Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 ( Tahun Rencana )				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				<b>61.212.425.005,19</b>				<b>69.534.302.726,00</b>
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase cakupan pelayanan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian yang sesuai SOP		<b>90%</b>	<b>39.550.286.935,19</b>		<b>Bagian Umum (RT dan Perlengkapan), Bagian Perencanaan dan Keuangan</b>	<b>90%</b>	<b>47.497.270.591,00</b>
		Indeks Kepuasan Masyarakat		<b>90,28</b>	<b>3.608.913.925,00</b>		<b>Bagian Umum (TU), Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>90%</b>	<b>5.044.254.900,00</b>
		Indeks Pelayanan Publik		<b>4,34</b>	<b>535.500.000,00</b>		<b>Bagian Organisasi</b>	<b>90%</b>	<b>589.050.000,00</b>
		Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)		<b>71</b>		<b>95%</b>			

<b>4.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase dokumen Perencanaan dan Keuangan yang di susun tepat waktu</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>95%</b>	<b>727.597.241</b>	<b>Dana Tranfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>Bagian Perencanaan dan Keuangan</b>	<b>95%</b>	<b>5.090.597.241</b>
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		13 Dokumen	365.000.000,00			13 Dokumen	465.000.000,00
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	362.597.241,19			4 Laporan	4.625.597.241,00
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase penyerapan anggaran tepat waktu</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>95%</b>	<b>20.169.985.874,00</b>	<b>Dana Tranfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>Bagian Perencanaan dan Keuangan / Bagian Umum</b>	<b>95%</b>	<b>23.200.477.000,00</b>
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		175 Orang/bulan	19.410.475.874,00		Bagian Perencanaan dan Keuangan	175 Orang/bulan	22.365.016.000,00
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		20 Dokumen	759.510.000,00		Bagian Umum	20 Dokumen	835.461.000,00
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>100%</b>	<b>419.000.000,00</b>	<b>Dana Tranfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>100%</b>	<b>460.900.000,00</b>
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		8 Paket	419.000.000,00			8 Paket	460.900.000,00

<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga</b>		<b>90</b>	<b>4.499.743.725,00</b>	<b>Dana Tranfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>90</b>	<b>4.837.149.000,00</b>
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	530.000.000,00			5 Paket	556.500.000,00
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	602.463.000,00			4 Paket	632.500.000,00
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	1.094.400.000,00			12 Paket	1.150.000.000,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	192.744.500,00			4 Paket	210.000.000,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		600 Laporan	2.080.136.225,00			600 Laporan	2.288.149.000,00
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya</b>		<b>90</b>	<b>545.000.000,00</b>		<b>Bagian Umum</b>		<b>545.000.000,00</b>
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya		20 Unit	545.000.000,00				600.000.000,00
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga</b>		<b>90</b>	<b>4.444.592.675,00</b>		<b>Bagian Umum</b>	<b>90</b>	<b>4.590.000.000,00</b>

4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	2.140.492.675,00			12 Laporan	2.240.000.000,00
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	2.304.100.000,00			12 Laporan	2.350.000.000,00
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Kelompok Asset Tetap dalam kondisi baik</b>		<b>4 Kelompok Asset Tetap</b>	<b>4.153.655.770,00</b>	<b>Dana Tranfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>4 Kelompok Asset Tetap</b>	<b>4.329.000.000,00</b>
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		42 Unit	1.409.008.000,00			42 Unit	1.460.000.000,00
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 Unit	1.744.647.770,00			20 Unit	1.794.000.000,00
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit	1.000.000.000,00			5 Unit	1.075.000.000,00
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Prosentase penyerapan anggaran tepat waktu</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>95%</b>	<b>2.889.102.375,00</b>	<b>Dana Tranfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>Bagian Perencanaan dan Keuangan / Bagian Umum</b>	<b>95%</b>	<b>2.993.757.350,00</b>
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/Bulan	1.889.102.375,00		Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 Orang/Bulan	1.943.757.350,00

4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		4 Orang	1.000.000.000,00		Bagian Umum	4 Orang	1.050.000.000,00
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga</b>		<b>90</b>	<b>4.734.000.000,00</b>	<b>Dana Tranfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>90</b>	<b>4.784.000.000,00</b>
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		12 Paket	336.000.000,00			12 Paket	336.000.000,00
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		12 Paket	168.000.000,00			12 Paket	168.000.000,00
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		150 Paket	4.230.000.000,00			150 Paket	4.280.000.000,00
<b>4.01.04.2.02</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi menyusun Laporan Kinerja (LKj)</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>47 Perangkat daerah</b>	<b>535.500.000,00</b>	<b>Dana Tranfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	<b>47 Perangkat daerah</b>	<b>589.050.000,00</b>
4.01.04.2.02.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Ponorogo	1 Laporan	317.946.000,00			1 Laporan	349.740.600,00
4.01.04.2.02.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Ponorogo	1 Dokumen	217.554.000,00			1 Dokumen	239.309.400,00
<b>4.01.04.2.03</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>95%</b>	<b>576.523.200,00</b>	<b>Dana Tranfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>95%</b>	<b>1.710.644.900,00</b>
4.01.04.2.03.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kabupaten Ponorogo	360 Laporan	167.973.200,00			360 Laporan	211.973.200,00

4.01.04.2.03.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Ponorogo	360 laporan	58.550.000,00			360 laporan	128.550.000,00
4.01.02.2.01.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kabupaten Ponorogo	360 laporan	350.000.000,00			360 laporan	1.370.121.700,00
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Nilai LPPD</b>		<b>3,1695</b>	<b>474.385.800,00</b>		<b>Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama</b>	<b>100%</b>	<b>675.000.000,00</b>
		<b>Efektifitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat</b>		<b>92%</b>	<b>14.569.872.200,00</b>		<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>92%</b>	<b>13.024.359.240,00</b>
		<b>Indeks Reformasi Hukum</b>		<b>98,5</b>	<b>466.384.000,00</b>		<b>Bagian Hukum</b>	<b>80%</b>	<b>752.500.000,00</b>
<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun LPPD dan SPM dengan benar dan tepat waktu</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>100%</b>	<b>437.147.800,00</b>	<b>Dana Tranfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama</b>	<b>100%</b>	<b>610.000.000,00</b>
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Ponorogo	10 Dokumen	180.075.000,00			10 Dokumen	200.000.000,00
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Ponorogo	2 Dokumen	10.942.800,00			2 Dokumen	20.000.000,00
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Ponorogo	15 Dokumen	246.130.000,00			15 Dokumen	390.000.000,00
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Prosentase koordinasi dibidang kesra dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>92%</b>	<b>14.569.872.200,00</b>	<b>Dana Tranfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>92%</b>	<b>13.024.359.240,00</b>
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kabupaten Ponorogo	4 Dokumen	5.645.990.200,00			4 Dokumen	6.992.832.510,00

4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kabupaten Ponorogo	3 Dokumen	6.008.882.000,00			3 Dokumen	1.935.171.100,00
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kabupaten Ponorogo	3 Dokumen	2.915.000.000,00			3 Dokumen	4.096.355.630,00
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>80%</b>	<b>466.384.000,00</b>	<b>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>Bagian Hukum</b>	<b>80%</b>	<b>752.500.000,00</b>
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kabupaten Ponorogo	1420 Dokumen	306.508.500,00			1420 Dokumen	450.000.000,00
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kabupaten Ponorogo	3 Kasus	121.959.500,00			3 Kasus	250.000.000,00
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kabupaten Ponorogo	1315 Dokumen	37.916.000,00			1315 Dokumen	52.500.000,00

<b>4.01.02.2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Prosentase kerjasama daerah yang terfasilitasi</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>100%</b>	<b>37.238.000,00</b>	<b>Dana Tranfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>		<b>100%</b>	<b>65.000.000,00</b>
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kabupaten Ponorogo	20 Dokumen	37.238.000,00			20 Dokumen	65.000.000,00
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan</b>		<b>90%</b>	<b>1.325.756.000,00</b>		<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>90%</b>	<b>982.670.000,00</b>
		<b>Tingkat kematangan UKPBJ</b>		<b>90%</b>	<b>541.404.357,00</b>		<b>Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA</b>	<b>90%</b>	<b>812.242.385,00</b>
		<b>Efektifitas kebijakan administrasi pembangunan</b>		<b>91%</b>	<b>139.921.788,00</b>		<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>	<b>89%</b>	<b>156.955.610,00</b>
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Prosentase permasalahan di bidang kebijakan perekonomian yang terselesaikan</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>100%</b>	<b>722.776.000,00</b>	<b>Dana Tranfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA</b>	<b>100%</b>	<b>180.170.000,00</b>
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Ponorogo	1 Dokumen	643.118.615,00			1 Dokumen	170.000,00
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kabupaten Ponorogo	1 Laporan	52.387.385,00			1 Laporan	100.000.000,00
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kabupaten Ponorogo	1 Dokumen	27.270.000,00			1 Dokumen	80.000.000,00

<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Prosentase Perangkat Daerah yang penyerapan dana APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>90%</b>	<b>139.921.788,00</b>	<b>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>	<b>90%</b>	<b>156.955.610,00</b>
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kabupaten Ponorogo	14 Dokumen	43.873.610,00			14 Dokumen	43.873.610,00
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten Ponorogo	12 Laporan	69.303.300,00			12 Laporan	85.000.000,00
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Ponorogo	12 Laporan	26.744.878,00			12 Laporan	28.082.000,00
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Prosentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>100%</b>	<b>541.404.357,00</b>	<b>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>100%</b>	<b>812.242.385,00</b>
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Ponorogo	1 Dokumen	465.193.507,00			1 Dokumen	697.790.260,00
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kabupaten Ponorogo	1 Dokumen	37.728.300,00			1 Dokumen	56.728.300,00
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Ponorogo	100 Orang	38.482.550,00			100 Orang	57.723.825,00
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam</b>	<b>Prosentase permasalahan/isu strategis di bidang sumber daya alam yang terselesaikan</b>	<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>100%</b>	<b>602.980.000,00</b>	<b>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>	<b>Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA</b>	<b>100%</b>	<b>802.500.000,00</b>

4.01.02.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kabupaten Ponorogo	1 Dokumen	571.500.000,00			1 Dokumen	742.500.000,00
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kabupaten Ponorogo	1 Dokumen	31.480.000,00			1 Dokumen	60.000.000,00

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 berisi program kegiatan dan sub kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selain itu disajikan pula program prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2026.

Dalam penyusunan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2026, dilaksanakan juga Forum Perangkat Daerah (FPD) yang diikuti oleh Lembaga/OPD sebagai mitra Sekretariat Daerah, antara lain :

- Bappeda Litbang Kab. Ponoogo
- BPPKAD Kab. Ponorogo
- Sekretariat Daerah
- Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo
- PD. Muhammadiyah Kab. Ponorogo
- PCNU Kab. Ponorogo
- BAZNAS Kab. Ponorogo
- MUI Kab. Ponorogo
- BULOG Kab. Ponorogo
- BPS Kab. Ponorogo
- Pihak ketiga penyedia barang / jasa

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan. FPD juga berfungsi sebagai wadah penyelarasan program dan kegiatan perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo. Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 diperoleh beberapa usulan atau aspirasi dari Lembaga/OPD, antara lain :

1. PD. Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo

- Pemetaan kembali terkait hibah serta pengaturan terkait regulai hibah;
- Dalam penyampaian hibah tahun 2026, usulan dari masyarakat atau lembaga dimasukkan terlebih dahulu sebelum nya di Pokok – pokok pikiran (POKIR) SIPD RI.

2. PC. NU Kabupaten Ponorogo

- Penanganan perawatan ODGJ (Panti Rehabilitasi Jiwa) dan rencana menggunakan asset pemprov;
- Pengajuan adanya beasiswa guru madrasah diniyah (MADIN) dari Pemda. Kab. Ponorogo.

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo

- Anggaran diharapkan tidak keluar di pertengahan tahun anggaran berjalan;
- Adanya pemberitahuan khusus terkait tahapan – tahapan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- Adanya permohonan adanya pendampingan – pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam kegiatan keagamaan atau kemasyarakatan, baik yang diadakan oleh MUI, NU / Muhammadiyah.

4. BULOG

- Peningkatan kerjasama Satuan Tugas Pangan (SATGAS PANGAN) terutama saat terjadi kenaikan harga bahan pokok, menghadapi Hari Raya Idul Fitri atau Natal, kelangkaan bahan pangan akibat bencana alam / perubahan musim panen;
- Penanggulangan inflasi dengan meningkatkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Ponorogo.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2026, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki dalam institusi dengan mendasarkan pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rencana Kerja Kabupaten ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Ponorogo, Agustus 2025



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO

AGUS PRAMONO